

**EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN
PESISIR TANGGUH (PKPT) DI DESA BEDONO KECAMATAN
SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Riskana Firdya, Kismartini
Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) merupakan sebuah program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07/Permen-KP/2012. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi dampak dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut. Kegiatan-kegiatan PKPT terdiri dari Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan atau Infrastruktur dan Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim. Dari hasil evaluasi menunjukkan dari kegiatan-kegiatan tersebut outputnya adalah terbangunnya sosialisasi pelatihan pembinaan usaha kecil, pembuatan jalan, rehabilitasi jembatan peninggian jalan, pengerasan jalan, pembuatan talud bambu dan talud bus beton pemecah ombak. Manfaatnya masyarakat merasa aman sudah tidak terkena banjir rob, masyarakat jadi semangat berkerja dan memiliki alternatif matapencaharian. Dampaknya masyarakat meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat akan tetapi pada kegiatan bina usaha tidak berdampak karena masyarakat tidak mau melanjutkan usaha kecil tersebut dengan alasan sudah tidak ada modal usaha. Program PKPT memiliki faktor penghambat yaitu tidak adanya kerjasama dengan Dinas lain, akses jalan yang sulit, remaja yang mengatasnamakan LSM. Penelitian ini memberi Rekomendasi perlu persiapan, sosialisasi dan pelatihan yang matang sebelum program benar-benar berjalan, program PKPT perlu adanya kerjasama dengan Dinas lain agar saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur memiliki tahapan yang sesuai dengan rasionalitas yang seharusnya, diperlukan pelatihan usaha sebagai alternatif matapencaharian warga desa bedono agar yang mendapatkan pembinaan usaha tidak hanya satu dusun saja, diperlukan keseriusan dan komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk bersinergi dalam membangun kawasan pesisir agar dalam pelaksanaannya tidak terterkesan hanya untuk mengejar target serapan anggaran semata

Kata Kunci: *Evaluasi Dampak, Program, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh*

ABSTRACT

The Tangguh Coastal Area Development Program (PKPT) is a National Community Empowerment Program for Marine and Fisheries that is regulated in the Regulation of the Minister of Marine and Fisheries No. 07 / Permen-KP / 2012. Through a qualitative descriptive approach, this study aims to evaluate the impact of the activities carried out in the program. PKPT activities consist of Human Development, Business Development, Community Development or Infrastructure and Disaster Preparedness or Climate Change. From the results of the evaluation, the outputs of the activities were the establishment of socialization of training on the development of small businesses, road construction, rehabilitation of road elevation bridges, road hardening, manufacture of bamboo taluds and concrete breakwaters. The benefit is that the community feels safe that they have not been affected by the tidal flood, the community has become enthusiastic about working and has alternative livelihoods. The impact is that the community has improved the socio-economic conditions of the community but the business development activities have no impact because the community does not want to continue the small business on the grounds that there is no business capital. The PKPT program has an inhibiting factor, namely the absence of cooperation with other agencies, difficult road access, adolescents on behalf of NGOs. This research gives recommendations that the preparation, socialization and training that is mature before the program really runs, the PKPT program needs cooperation with other agencies so that when the implementation of infrastructure development has stages in accordance with the rationality that should be, business training is needed as an alternative livelihood for the Bedono villagers. so that those who get business coaching are not just one hamlet, it requires seriousness and high commitment from all parties to synergize in building the coastal area so that the implementation is not impressed only to pursue budget absorption targets only.

Keywords: *Evaluasi Dampak, Program, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang berpemukiman di wilayah pesisir dan melakukan kegiatan usaha di kawasan pesisir ataupun usaha lainnya serta kegiatan yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Dan desa pesisir di Indonesia sedang dihadapkan pada empat persoalan pokok, yaitu: tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, tingginya kerusakan sumberdaya alam pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan lunturnya nilai-nilai budaya masyarakat, rendahnya infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman.

Permasalahan tersebut mendapat perhatian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menginisiasi kegiatan yang diharapkan mampu menjadi penghela kemajuan desa-desa pesisir di Indonesia, yakni melalui Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012 mengembangkan Program Pengembangan Kawasan Pesisir

Tangguh (PKPT). Kemudian yang sekarang bernama Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). PKPT merupakan bentuk akselerasi dari Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) yang sudah terlaksana pada tahun 2012-2014. Kegiatan ini adalah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07/Permen-KP/2012. Bentuk program ini adalah bantuan pengembangan manusia, sumber daya, infrastruktur, usaha dan siaga bencana dan perubahan iklim.

Program PKPT ini memiliki tujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim di desa pesisir, meningkatkan kualitas hidup di desa pesisir, mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif oleh masyarakat desa dengan melibatkan peran serta perempuan dan memfasilitasi kegiatan pembangunan atau pengembangan sarana dan/atau

prasarana sosial ekonomi di desa pesisir.

Pada Program PKPT (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh) tersebut diharapkan akan bermuara pada pengentasan kemiskinan pada masyarakat daerah pesisir. Kabupaten Demak mempunyai potensi perikanan yang sangat melimpah, baik perikanan laut maupun perikanan darat, dengan garis pantai sepanjang 72,14 km dan luas perairan umum yang mencapai 915,66 km² membuat Pemerintah Kabupaten Demak menjadi sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor prioritas. Tetapi pada kawasan pesisir khusus Kecamatan Sayung Kabupaten Demak menurut NGO wetland permukaan tanah turun 7,8cm/tahun. Kemudian pada penelitian Bayu Trisna (2012) secara deskriptif diketahui bahwa daerah pesisir di Kecamatan Sayung yang terkena banjir rob pada ketinggian 0,25m adalah Desa Sriwulan, Desa Surodadi, Desa Bedono dan Desa Timbulloko. Dampak banjirrob antara lain: kerusakan bangunan tempat tinggal, salinitas air tanah, kerusakan lahan tambak, dan,

kehilangan lahan, serta kerusakan pada kendaraan atau peralatan kerja.

Sebuah program berbasis masyarakat dan dirancang dengan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan merupakan sesuatu yang akan sangat bermanfaat bagi kelompok sasaran. Dengan melihat tujuan dari program PKPT tujuan yang baik antara lain untuk menata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir, kemudian memfasilitasi peran masyarakat sebagai agen pembangunan kelautan perikanan baik secara kelompok maupun individu. Penulis tertarik melakukan penelitian terhadap program PKPT tersebut.

Penulis ingin melakukan penelitian terhadap program PKPT dan melihat apakah program ini telah berjalan dengan baik dan mengapa program berhenti. Yang pada idealnya sebuah program dijalankan sebaiknya selama lima tahun berturut-turut. Tetapi program tersebut hanya berjalan tiga tahun. Dengan melihat kondisi permasalahan yang dihadapi Desa Bedono pada implementasi program Pengembangan Kawasan Pesisir

Tangguh (PKPT) diatas maka saya akan meneliti tentang **EVALUASI DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR TANGGUH (PKPT) DI DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja lingkup kegiatan dari program Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana dampak yang terjadi setelah adanya program Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ?
3. Apa saja kendala atau faktor penghambat program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PKPT) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui lingkup kegiatan yang ada pada Program kebijakan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT).
2. Mengevaluasi dampak yang terjadi setelah adanya program

Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT).

3. Untuk mengetahui apa saja kendala atau faktor penghambat kebijakan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT).

D. Kajian Teori

Kebijakan Publik

Menurut Subarsono dalam Sri Suwitri (2008: 90), evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai kinerja suatu kebijakan. Kapan suatu evaluasi dapat dilakukan, tidak ada batas waktu yang pasti kapan suatu kebijakan dapat dievaluasi. Menurut AG. Subarsono dalam Sri Suwitri (2008: 90) kapan evaluasi kebijakan dilaksanakan sangat tergantung pada kebijakan publik yang sedang diimplementasikan. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang, paling tidak 5 tahun semenjak kebijakan diimplementasikan, untuk dapat mengetahui *outcome* dan dampak suatu kebijakan. Sebaliknya, semakin teknis sifat suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang

relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan tersebut.

Evaluasi Kebijakan Publik

James Anderson dalam (Winarno, 2014 : 230-233) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

a. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini

melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Dapat diambil kesimpulan evaluasi kebijakan memiliki arti yang berhubungan yang masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan suatu program.

Evaluasi Dampak Program

Evaluasi dampak sendiri merupakan evaluasi yang mencermati dampak tetap atau dampak jangka panjang. Evaluasi dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan. Dampak yang dimaksud adalah dampak yang diharapkan serta dampak yang tidak diharapkan. (Samudra Wibawa 1994: 29)

Output adalah keluaran dari sistem kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa, dan program. Sebagai contoh, output proyek irigasi adalah tersedianya saluran irigasi sepanjang sekian kilo meter. Sedangkan *outcome* adalah

hasil dari suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan. Contohnya: proyek irigasi, maka *outcomes*-nya adalah tersedianya suplay air berjumlah sekian kubik, peningkatan jumlah luas sawah yang mendapat irigasi. *Benefit* adalah keuntungan atau manfaat dari suatu kebijakan yang telah berjalan sebagai akibat dari diimplementasikannya suatu kebijakan atau program. Contoh: proyek irigasi, maka masyarakat memiliki manfaat dapat menggunakan air untuk kebutuhan sehari – hari. *Impact* (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Contoh: proyek irigasi, maka dampaknya adalah meningkatkan frekuensi tanam padi, kenaikan tingkat produksi padi dan meningkatnya pendapatan petani.

Hasil kebijakan Dunn, (2000:513) membedakan dua jenis akibat yaitu keluaran (*outputs*) dan dampak (*impact*). Keluaran kebijakan adalah barang layanan atau sumberdaya yang diterima oleh

kelompok sasaran atau kelompok penerima (*beneficiaries*). Menurut Dunn, dampak kebijakan dapat berupa perubahan fisik maupun sosial sebagai akibat dari keluaran kebijakan tersebut.

E. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambar secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Dengan demikian, penelitian ini menjelaskan fenomena yang ada di dalam program pengembangan desa pesisir tangguh di desa bedono kecamatan saying kabupaten Demak.

Analisis Data

Analisis data lapangan dilakukan menggunakan analisis proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data (Moleong,2010:280).

Kualitas Data

Dalam penelitian ini teknik validitas data yang digunakan peneliti adalah Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Denzin (Dalam Bungin, 2012:257-259) membedakan empat macam triangulasi untuk menguji keabsahan hasil penelitian, yaitu :

1. *Trianggulasi kejujuran penelitian.*

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan dengan meminta bantuan dari peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapanga dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda.

2. *Trianggulasi sumber data.* membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda.

3. *Trianggulasi metode.* Pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data.

4. *Trianggulasi teori.* Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyetarakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau pembanding.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Lingkup kegiatan program

PKPT di Desa Bedono

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Bina Manusia

Kegiatan bina manusia mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat formal maupun informal, memperluas dan meningkatkan kerjasama, memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin dan hemat serta menghilangkan sifat negatif boros dan konsumtif. Pertama, pelatihan atau sosialisasi kelembagaan di Desa Bedono yaitu pembentukan KMP

(Kelompok Masyarakat Pesisir) kemudian KMP menyusun RKK (Rencana Kerja Kelompok) sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Kedua, sosialisasi atau pelatihan kewirausahaan. Ketiga, masyarakat Desa Bedono diberikan pelatihan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan terjadi. Kemudian pengarahan atau menumbuhkan rasa kerjasama dan gotong rotong antar warga desa.

Bina Usaha

berupa sarana mata pencaharian alternatif serta sarana pengolahan hasil sumber daya alam yang ada. Sesuai hasil data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Demak kegiatan bina usaha yang terealisasi di Desa Bedono adalah berupa pelatihan pembuatan krupuk mangrove dan bronis mangrove.

Bina Lingkungan atau Infrastruktur

Pemerintah memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat persisir desa Bedono yaitu berupa pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan di Desa Bedono berupa pembangunan perbaikan jalan, dan

pembuatan jembatan atau jalan evakuasi. Kegiatan bina lingkungan atau infrastuktur dalam hal ini pembuatan atau pembenahan infrastruktur desa bedono tidak semena – mena melaksanakan kegiatan tidak menggunakan waktu. Masyarakat harus menyelesaikan kegiatan tersebut dalam waktu kurang lebih satu bulan sama dengan empat puluh (40) hari kerja.

Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim

Kegiatan bina siaga bencana atau infrastruktur ini pemerintah memberikan memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat pesisir desa Bedono yaitu berupa kegiatan pembuatan talud bus beton penaham ombak dan talud bambu pemecah ombak. Kegiatan bina siaga bencana atau perubahan iklim

b. Dampak yang terjadi setelah adanya program Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Bina Manusia

Output kegiatan bina manusia adalah Pembinaan pembentukan organisasi KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir,

arahan pembuatan RKK (Rencana Kerja Kelompok), terselenggaranya kegiatan bina usaha, infrastruktur dan siaga bencana. motivasi untuk semangat kerja gotong-royong membangun desa. Benefit, terjalannya kerukunan masyarakat desa bedono, tertanamnya jiwa masyarakat yang memiliki rasa semangat jiwa gotong-royong desa. Dampaknya adalah masyarakat yang disiplin waktu, masyarakat yang hemat biaya pengeluaran.

Bina Usaha

Output diberikannya peralatan untuk membuat usaha krupuk. Benefitnya dapat membuat usaha krupuk dan mandiri hasil dari pelatihan yang telah diberikan Dinas KP. Dampaknya adalah Tidak berdampak positif karena masyarakat tidak mau mengembangkan usaha yang sudah dibina oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Padahal dari pihak Dinas sudah memberikan arahan baiknya usaha tersebut dipasarkan. Akan tetapi usaha tersebut tidak berjalan baik dengan alasan dari masyarakat

yang tidak ada modal lagi untuk mengembangkan usaha tersebut.

Bina Lingkungan atau Infrastruktur.

Outputnya adalah terbuatnya peninggian jalan rehabilitasi jembatan dan peninggian jembatan evakuasi. Benefitnya, Sudah tidak terkena banjir rob yang tiba-tiba datang. Dampaknya adalah Mereka sekarang jadi semangat bekerja, warga mudah melaksanakan segala kegiatan sehari-harinya karena sudah tidak terkena banjir rob. Dengan dibuatkannya fasilitas infrastruktur masyarakat menjadi merasa aman dan nyaman tidak terkena banjir rob lagi.

Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim

Output kegiatan ini adalah terbangunnya talud bambu pada tahun 2013 dan tahun 2014-2015 talud bus beton penahan ombak. Benefitnya, tidak jauh berbeda dengan bina lingkungan atau infrastruktur yaitu tidak terkena banjir rob lagi. Dampaknya adalah dari tahun 2013 hingga 2015

masyarakat dapat melaksanakan kegiatan sosial, ekonomi dengan lancar hingga tahun 2015 karena sekarang keadaannya volume air laut yang naik ke pemukiman sedikit demi sedikit sudah mulai bertambah membuat kegiatan masyarakat mulai terhambat. Akan tetapi sekarang talud tersebut sudah tidak berdiri kokoh seperti sediakala.

c. Kendala/faktor penghambat program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PKPT)

Untuk mendeskripsikan faktor penghambat maka penulis menggunakan pendekatan faktor internal dan eksternal yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor internal: Dana bantuan program, tidak adanya koordinasi antar OPD, akses lokasi yang sulit
2. Faktor eksternal: Remaja desa yang mengatasnamakan LSM.

3. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lingkup program dan mengevaluasi dampak program Pengembangan Kawasan Pesisir

Tangguh (PKPT) di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak,

1. Lingkup program PKPT di Desa Bedono yaitu: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan atau Infrastruktur, Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim.

Hasil evaluasi dampak menunjukkan Dampak masyarakat meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat akan tetapi pada kegiatan bina usaha tidak berdampak karena masyarakat tidak mau melanjutkan usaha kecil tersebut dengan alasan sudah tidak ada modal usaha

Saran

- 1) Diperlukan persiapan, sosialisasi dan pelatihan yang matang dan terstruktur sebelum program benar-benar dijalankan agar setiap dusun dapat mengetahui pengetahuan tentang program PKPT tersebut.
- 2) Pelatihan usaha di Desa Bedono seharusnya di upayakan semua dusun mendapatkan pembinaan usaha.
- 3) Pada program PKPT ini perlu adanya kerjasama dengan Dinas lain agar saat pelaksanaan

pembangunan infrastruktur memiliki tahapan yang sesuai rasionalitas yang seharusnya. Contohnya pembuatan talud atau pembuatan jalan perlu kerjasama dengan dinas PU (Pekerjaan Umum).

- 4) Diperlukan keseriusan dan komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk bersinergi dalam membangun kawasan pesisir, agar dalam pelaksanaannya tidak terkesan hanya untuk mengejar target serapan anggaran semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keputusan Bupati Demak Nomor: 523.76/387 Tahun 2015. (n.d.). *Pembentukan Tim*

Teknis Kegiatan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Tahun 2015 Pada Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.

- Keputusan Bupati Nomor 523/39/2013. (n.d.). *Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Pada Satuan Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak yang Dibiayai dari Dana Tugas Pembantu Lingkup DITJEN Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013*.

Penjelasan Petunjuk Operasional Kegiatan. (2012). *Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Dalam Rangka PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan*.

Peraturan Direktur Jendral Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor PER.04/KPEK/2012. (n.d.). *Tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Tahun 2012*.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/2012. (n.d.). *Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2012*.

